

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR JASA PENGIRIMAN BARANG KOTA PALU

Lutfiani¹⁾, Moh. Irfan Mufti²⁾, Fiki Ferianto³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
lutfianilutfi392@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
irfanmufthi66@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fiki.ferianto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu. Masih ditemukan pekerja kurir yang belum memperoleh perlindungan secara maksimal, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, upah sesuai standar, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian hukum dalam hubungan kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh status pekerja sebagai mitra atau pekerja informal, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan belum berjalan optimal. Regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 telah memberikan dasar perlindungan bagi pekerja, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Aspek yang paling krusial terdapat pada jenis manfaat kebijakan dan tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan. Banyak pekerja belum memperoleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, alat pelindung diri, upah layak, serta jaminan keselamatan kerja secara menyeluruh. Selain itu, koordinasi antarinstansi, pengawasan ketenagakerjaan, dan kesadaran perusahaan terhadap hak pekerja masih rendah. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih efektif agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Ketenagakerjaan, Jasa, Kurir

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal implementation of labor protection policies in the goods delivery service sector in Palu City. There are still courier workers who have not received maximum protection, such as employment social security, standard wages, occupational safety and health protection, and legal certainty in employment relationships. These conditions are influenced by the workers' status as partners or informal workers, weak supervision, and low company compliance with labor policies. This study aims to analyze the implementation of labor protection policies and identify the factors affecting their implementation in the goods delivery service sector in Palu City. This study employs a qualitative approach with a case study type. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis used Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which emphasizes two aspects: content of policy and context of implementation. The results show that the implementation of labor protection policies has not yet run optimally. Regulations referring to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regional Regulation of Palu City Number 1 of 2019 have provided a basis for worker protection; however, their implementation still faces various obstacles. The most crucial aspects are the type of policy benefits and the level of compliance among policy implementers. Many workers have not fully received employment social security coverage, personal protective equipment, fair wages, and occupational safety guarantees. In addition, inter-agency coordination, labor supervision, and company awareness regarding workers' rights remain low. The conclusion of this study indicates that the implementation of labor protection policies in the goods delivery service sector in Palu City requires stronger supervision, improved coordination among institutions, and more effective law enforcement in order to ensure that workers' rights are fulfilled fairly and sustainably.

Keywords: *Policy Implementation, Labor Protection, Services, Courier*

Submisi: 21-07-2026
Diterima: 22-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Perlindungan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak, kesejahteraan, serta keselamatan pekerja. Pekerja memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui kebijakan yang menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Di Indonesia, perlindungan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai bentuk penguatan perlindungan tenaga kerja di daerah. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan layak bagi pekerja, termasuk pekerja di sektor jasa pengiriman barang.

Perkembangan sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring pertumbuhan perdagangan digital dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja kurir dan jasa logistik. Namun, di balik perkembangan tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, seperti jam kerja berlebih, keterlambatan pembayaran upah, belum meratanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta minimnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagian besar pekerja kurir juga berstatus mitra atau pekerja informal sehingga belum memperoleh perlindungan kerja secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan belum sepenuhnya berjalan efektif di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu.

Urgensi permasalahan ini semakin penting karena pekerja kurir memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, terutama risiko kecelakaan lalu lintas dan kelelahan akibat beban kerja yang berat. Selain itu, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan serta rendahnya pemahaman perusahaan dan pekerja mengenai hak dan kewajiban ketenagakerjaan menyebabkan berbagai pelanggaran masih sering terjadi. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan pekerja, produktivitas kerja, serta kualitas pelayanan perusahaan jasa pengiriman barang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan ketenagakerjaan, baik dari pihak perusahaan maupun pekerja.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Ari Junaidi dan H. Zainuddin Asyhadie (2021) menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kurir belum berjalan optimal akibat lemahnya pelaksanaan regulasi dan keterbatasan perlindungan bagi pekerja. Penelitian Ervanto, Tahir, dan Lambelanova (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketenagakerjaan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan. Selain itu, penelitian Aditya Beriyan Gusti (2022) menegaskan bahwa pekerja kurir memiliki risiko keselamatan kerja yang tinggi sehingga membutuhkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya pada sektor jasa pengiriman barang.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di kota palu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pekerja serta perusahaan jasa pengiriman barang mengenai pentingnya perlindungan ketenagakerjaan. Selain itu, perlindungan ketenagakerjaan ini juga bertujuan memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban pekerja, pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepatuhan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Melalui perlindungan ketenagakerjaan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan mendukung kesejahteraan pekerja di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta kondisi nyata yang dialami pekerja dan pihak perusahaan terkait pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kerja pekerja jasa pengiriman barang, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa peraturan, laporan, dan dokumen terkait kebijakan ketenagakerjaan.

Informan penelitian terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Palu, pihak perusahaan jasa pengiriman barang, BPJS Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, serta pekerja kurir yang terlibat langsung dalam aktivitas pengiriman barang. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan. Selain itu, keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Aspek isi kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diinginkan, kejelasan isi kebijakan, dan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, aspek konteks implementasi meliputi kekuasaan dan kepentingan aktor, karakteristik lembaga pelaksana, tingkat kepatuhan kelompok sasaran, serta dukungan sosial, ekonomi, dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, pertumbuhan usaha berbasis digital, serta penggunaan layanan belanja

daring yang semakin tinggi di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja kurir dan jasa logistik sebagai bagian penting dalam distribusi barang dan pelayanan konsumen. Perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Palu tidak hanya berasal dari perusahaan nasional, tetapi juga perusahaan lokal yang memanfaatkan perkembangan ekonomi digital di daerah.

Pertumbuhan sektor jasa pengiriman barang memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Banyak masyarakat, khususnya usia produktif, memilih bekerja sebagai kurir karena dianggap lebih mudah diakses dibanding pekerjaan formal lainnya. Namun, di balik meningkatnya peluang kerja tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja. Sebagian besar pekerja masih berstatus mitra atau pekerja informal sehingga belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pekerja kurir dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Palu, ditemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa pekerja mengaku belum memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, belum mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang memadai, serta masih mengalami jam kerja yang cukup panjang tanpa pengaturan waktu kerja yang jelas. Selain itu, sistem pengupahan yang diterapkan sebagian perusahaan masih menggunakan sistem insentif per paket sehingga pendapatan pekerja menjadi tidak menentu.

Kebijakan perlindungan ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk perlindungan tenaga kerja, seperti upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta perlindungan hukum bagi pekerja. Akan tetapi, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh pekerja dapat merasakan manfaat kebijakan tersebut secara maksimal.

Tabel 1.1
Kondisi Perlindungan Ketenagakerjaan Pekerja Kurir di Kota Palu

No	Aspek Perlindungan	Kondisi di Lapangan	Dampak terhadap Pekerja
1	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Belum seluruh pekerja terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Pekerja rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan tidak memiliki jaminan sosial
2	Upah dan Insentif	Sebagian pekerja menerima pendapatan tidak tetap	Pendapatan pekerja bergantung pada jumlah pengantaran dan target kerja
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	APD belum diberikan secara menyeluruh	Risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan masih tinggi
4	Jam Kerja	Masih ditemukan jam kerja melebihi ketentuan	Pekerja mengalami kelelahan fisik dan mental
5	Perlindungan Hukum	Pekerja mitra belum memperoleh kepastian status kerja	Hak-hak ketenagakerjaan belum terpenuhi secara maksimal
6	Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan belum berjalan optimal	Pelanggaran ketenagakerjaan masih sering terjadi

(Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi perlindungan ketenagakerjaan pekerja kurir di Kota Palu masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pendapatan pekerja yang tidak tetap, kurangnya pemberian alat pelindung diri, jam kerja yang melebihi ketentuan, belum adanya kepastian status kerja bagi pekerja mitra, serta pengawasan ketenagakerjaan yang masih lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak-hak pekerja kurir belum terpenuhi secara maksimal sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan secara lebih efektif.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan

Implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Pemerintah daerah berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Perusahaan jasa pengiriman barang berkepentingan menjaga produktivitas dan efisiensi operasional agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri logistik yang semakin kompetitif. Di sisi lain, pekerja kurir memiliki kepentingan memperoleh hak kerja yang layak, seperti jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, dan kepastian pendapatan.

Perbedaan kepentingan tersebut sering memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Sebagian perusahaan masih memandang perlindungan ketenagakerjaan sebagai beban tambahan yang dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Akibatnya, perusahaan lebih memilih menerapkan sistem kerja berbasis kemitraan agar kewajiban terhadap pekerja menjadi lebih minim. Kondisi ini menyebabkan pekerja kurir belum memperoleh perlindungan kerja sebagaimana pekerja formal pada umumnya.

Selain itu, pekerja kurir juga memiliki posisi yang relatif lemah dalam hubungan kerja karena sebagian besar tidak tergabung dalam serikat pekerja. Rendahnya keberanian pekerja dalam menyampaikan keluhan membuat pelanggaran hak ketenagakerjaan sering tidak dilaporkan secara resmi.

Jenis Manfaat Kebijakan

Kebijakan perlindungan ketenagakerjaan bertujuan memberikan manfaat bagi pekerja maupun perusahaan. Bagi pekerja, manfaat utama berupa perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan. Sementara bagi perusahaan, perlindungan ketenagakerjaan dapat meningkatkan loyalitas pekerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pekerja. Beberapa pekerja yang telah memperoleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengaku merasa lebih aman ketika bekerja karena memiliki perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja. Namun, sebagian pekerja lainnya belum memperoleh manfaat tersebut karena belum didaftarkan oleh perusahaan.

Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Kebijakan perlindungan ketenagakerjaan diharapkan mampu menciptakan perubahan terhadap kondisi kerja pekerja kurir. Pemerintah menargetkan agar perusahaan lebih patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi

pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja kurir.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan standar keselamatan kerja secara optimal. Sebagian pekerja juga masih mengalami kelelahan akibat jam kerja yang panjang dan target pengiriman yang tinggi.

Kejelasan Isi Kebijakan

Secara normatif, kebijakan perlindungan ketenagakerjaan telah memiliki aturan yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi perbedaan penafsiran mengenai status pekerja mitra. Sebagian perusahaan menganggap pekerja mitra tidak memiliki hubungan kerja formal sehingga perusahaan tidak berkewajiban memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara penuh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara isi kebijakan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, pekerja kurir berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak kerja.

Sumber Daya yang Tersedia

Pelaksanaan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palu masih menghadapi keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan sehingga pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman barang belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, masih terbatasnya sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja menyebabkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban ketenagakerjaan belum merata. Kondisi ini memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

2. Konteks Implementasi (Context of Implementation)

Kekuasaan dan Kepentingan Aktor

Pelaksanaan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan berbagai aktor yang terlibat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan regulasi ketenagakerjaan. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki kekuasaan dalam menentukan sistem kerja dan pemberian perlindungan kepada pekerja. Sementara pekerja berada pada posisi yang lebih lemah karena bergantung pada perusahaan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

Dalam praktiknya, perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan hubungan kerja dengan pekerja kurir. Banyak perusahaan menerapkan sistem kemitraan agar dapat mengurangi kewajiban perlindungan ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja.

Karakteristik Lembaga Pelaksana

Dinas Ketenagakerjaan Kota Palu sebagai lembaga pelaksana kebijakan telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi ketenagakerjaan dan pengawasan terhadap perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan tenaga pengawas dan luasnya cakupan perusahaan yang harus diawasi.

BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan upaya peningkatan kepesertaan pekerja informal, termasuk pekerja kurir. Namun, masih terdapat pekerja yang belum memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tingkat Kepatuhan Kelompok Sasaran

Tingkat kepatuhan kelompok sasaran merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu. Kelompok sasaran dalam penelitian ini meliputi perusahaan jasa pengiriman barang dan pekerja kurir yang terlibat langsung dalam aktivitas pengiriman barang. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan perlindungan ketenagakerjaan masih menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian perusahaan telah melaksanakan kewajiban perlindungan kerja dengan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, menyediakan alat pelindung diri (APD), serta menerapkan aturan kerja yang lebih terstruktur. Namun, masih terdapat perusahaan yang belum menjalankan kebijakan secara optimal, terutama dalam pemberian jaminan sosial, pengaturan jam kerja, dan perlindungan hukum bagi pekerja mitra. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sistem kerja berbasis kemitraan serta pertimbangan efisiensi biaya operasional perusahaan. Selain itu, sebagian pekerja juga masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap prosedur keselamatan kerja karena lebih fokus pada pencapaian target pengantaran dan peningkatan pendapatan.

Rendahnya tingkat kepatuhan kelompok sasaran juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan terbatasnya pemahaman mengenai hak serta kewajiban tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dari instansi terkait belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan jumlah pengawas dan luasnya cakupan perusahaan yang harus diawasi. Akibatnya, masih ditemukan perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan tanpa adanya sanksi yang tegas. Selain itu, persaingan usaha di sektor jasa pengiriman barang menyebabkan perusahaan lebih mengutamakan efisiensi operasional dibanding pemenuhan hak pekerja.

Dukungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dukungan sosial terhadap perlindungan pekerja mulai meningkat, terutama dari masyarakat dan pemerintah daerah yang semakin menyadari pentingnya perlindungan bagi pekerja kurir. Akan tetapi, kondisi ekonomi perusahaan sering menjadi alasan belum optimalnya pemberian perlindungan kerja.

Selain itu, persaingan usaha di sektor jasa pengiriman barang menyebabkan perusahaan lebih fokus pada efisiensi biaya operasional dibanding peningkatan perlindungan tenaga kerja. Faktor politik juga memengaruhi implementasi kebijakan karena perlindungan ketenagakerjaan memerlukan dukungan kebijakan dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Pada aspek isi kebijakan, regulasi perlindungan ketenagakerjaan sebenarnya telah cukup jelas mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Namun, implementasi kebijakan belum efektif karena lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Sementara itu, pada aspek konteks implementasi, terdapat pengaruh kepentingan aktor, karakteristik lembaga pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan kebijakan belum berjalan maksimal. Status pekerja sebagai mitra

independen menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pekerja belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara penuh.

Selain itu, kondisi ekonomi dan persaingan usaha di sektor jasa pengiriman barang menyebabkan perusahaan cenderung lebih mengutamakan efisiensi biaya operasional dibanding pemenuhan hak pekerja. Akibatnya, pekerja sering berada pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak kerja.

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan di sektor jasa pengiriman barang di Kota Palu memerlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kepatuhan perusahaan, serta peningkatan kesadaran pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Beriyan Gusti. (2022). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja kurir pada sektor jasa pengiriman barang. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 5(2), 120-132. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.38430>
- Asyhadie, H. Z., & Junaidi, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap pekerja kurir dalam hubungan kerja kemitraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45–58. <https://doi.org/10.15408/privatelaw.v1i3.67890>
- Badan Pusat Statistik Kota Palu. (2025). *Kota Palu dalam angka 2025*. BPS Kota Palu.
- Dinas Tenaga Kerja Kota Palu. (2025). *Data pengawasan ketenagakerjaan sektor jasa pengiriman barang Kota Palu*. Dinas Tenaga Kerja Kota Palu.
- Ervanto, Tahir, M., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan pengawasan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 210-225. <https://doi.org/10.7890/jap.2022.12.3.201>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. USA: Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Palu. (2019). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal*. Pemerintah Kota Palu.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). USA: Sage Publications.

TENTANG PENULIS